

SUKSMA

Mendasar dan Menggugah

Editorial: Pendidikan Perang	1-4
Pendidikan Progresif	5-12
T. Priyo Widiyanto	
Pendidikan, Pengasingan	13-19
C. Siswa Widiyatmoko	
Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Psikologi 2002	20-32
A. Supratiknya	
Menimbang (Kembali) <i>Liberal Arts</i> dalam Pendidikan Universitas (Dan Implementasinya dalam Program Pendidikan Psikologi)	33-49
Agus Suwignyo	
Identifiabilitas Sebagai Sumber Motivasi Individu untuk Memberikan Sumbangan dalam Kelompoknya	50-58
Agnes Indar Etikawati	
Tinjauan Buku: <i>Culture and the Shaping of Mind</i>	59-61
Biodata Penulis	62

KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA PSIKOLOGI 2002

A. Supratiknya

Abstract

Responding to the new requirement for developing a competency-based curriculum, the present article proposes a model curriculum for the *Program Pendidikan Sarjana Psikologi*. The curriculum comprises a *Kurikulum Inti* which characterizes the *Kompetensi Utama* and a *Kurikulum Institusional* concentrated on Cross-Cultural Psychology which characterizes the *Kompetensi Pendukung*. Both *Kompetensi Utama* and *Kompetensi Pendukung* are organized based on the five competency elements as well as the six core competencies of the education of professional psychologists developed by the U.S. National Council of Schools of Professional Psychology. The overall course load of the curriculum amounts to a total of 150 *satuan kredit semester* or units. A scheme for differentiating levels of expertise of graduates of the Sarjana, Magister and Doktor education programs is also introduced.

Kata Kunci: *competency-based curriculum, core competencies, Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, Kurikulum Inti, Kurikulum Institusional.*

1. Pendahuluan

Menurut ketentuan resmi mutakhir (Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002, selanjutnya disebut *Kepmen 045*), kurikulum pendidikan tinggi semua program studi di Tanah Air berbasis kompetensi. Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus namun gayut dengan kompetensi utama. Masing-masing kompetensi itu harus mencakup apa yang dalam Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 (selanjutnya disebut *Kepmen 232*) elemen-elemen pengembangan kepribadian, penguasaan ilmu dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya, dan pemahaman kaidah berkehidupan masyarakat. Kurikulum Inti merupakan penciri kompetensi utama dan merupakan acuan baku minimal yang berlaku secara nasional dan internasional serta ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara kalangan Perguruan Tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Kurikulum Institusional merupakan penciri kompetensi

pendukung dan kompetensi lain yang gayut dengan kompetensi utama dan yang ditetapkan sendiri oleh institusi penyelenggara program studi. Beban studi program sarjana berkisar antara 144-160 satuan kredit semester (*sks*). Perbandingan beban studi yang dinyatakan dalam bentuk *sks* antara kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain adalah (40-80%):(20-40%):(0-30%). Mendiknas tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan Perguruan Tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Kurikulum inti yang ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya kurikulum inti oleh Tripartit yang dimaksud.

Di lingkungan pendidikan Psikologi di Tanah Air, Tripartit yang dimaksud terepresentasikan oleh Fakultas-fakultas Psikologi baik negeri maupun swasta mewakili kalangan Perguruan Tinggi dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsti) mewakili organisasi profesi. Pihak pengguna lulusan tidak memiliki lembaga

perwakilan tersendiri. Namun, pribadi-pribadi yang berasal dari kalangan Perguruan Tinggi dan dari lingkungan organisasi profesi, khususnya para pimpinan Fakultas dan pimpinan atau pemilik organisasi atau perusahaan yang sekaligus merupakan warga Perguruan Tinggi dan/atau pimpinan/warga organisasi profesi, kiranya dapat dipandang mewakili pengguna lulusan. Dengan kata lain, Fakultas-fakultas Psikologi dan Himpsi secara de facto kiranya bisa dipandang telah mewakili Tripartit sebagaimana dimaksud oleh keputusan Mendiknas.

Menyangkut penataan pendidikan tinggi psikologi di Tanah Air umumnya dan pengembangan kurikulum program Sarjana Psikologi khususnya dalam rangka mengantisipasi dan menanggapi kebijakan baru Pemerintah tentang kurikulum program sarjana, Fakultas-fakultas Psikologi dan Himpsi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah menetapkan sejumlah kesepakatan-kebijakan dan mengambil langkah-langkah yang cukup penting. Dua di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut. Pertama, tentang pendidikan profesi psikologi, Himpsi memandang perlu diselenggarakan pendidikan profesi psikologi setara S2 sehingga lulusannya disebut Psikolog sekaligus diberi gelar Magister Psikologi. Penyelenggaraan pendidikan profesi psikolog pada strata magister itu harus dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun atau penyelenggaraan program pendidikan profesi dengan sistem S1 plus sebagaimana dianut dalam Kurikulum 1994 hanya akan berlangsung sebanyak-banyaknya tiga tahun akademik, terhitung sejak ketetapan tersebut dibuat yaitu tanggal 19 Agustus 2000 (Himpsi, 2000). Dari dua ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa praktis penyelenggaraan pendidikan profesi psikolog pada strata S2 perlu mulai dilaksanakan pada tahun akademik 2004/2005. Konsekuensinya, perubahan atas Kurikulum 1994 mengikuti ketentuan yang diatur dalam *Kepmen 045* tentang kurikulum berbasis kompetensi

idealnya juga perlu dilaksanakan mulai tahun akademik 2004/2005.

Kedua, sehubungan dengan rencana-rencana perubahan tersebut, sesudah melalui pembicaraan yang disebut Kolokium sebanyak paling sedikit tujuh kali antara tahun 1998 sampai dengan 2002, akhirnya disahkan Surat Ketetapan Bersama antar Dekan Fakultas Psikologi se Indonesia dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Psikologi (Nomor: 01/KOL.PSI/02, selanjutnya disebut *Ketber 01*), Program Pendidikan Magister Profesional Psikologi (Psikolog, Nomor: 02/KOL.PSI/02 selanjutnya disebut *Ketber 02*), dan Program Pendidikan Magister Sains Psikologi (Nomor: 03/KOL.PSI/02, selanjutnya disebut *Ketber 03*).

Sesuai dengan berbagai ketetapan di atas, kiranya penting dan mendesak bagi setiap Fakultas Psikologi untuk segera menyiapkan kurikulum baru khususnya untuk program Sarjana Psikologi agar dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, yaitu mulai tahun akademik 2004/2005. Tulisan ini bermaksud memaparkan suatu model kurikulum berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud oleh berbagai kebijakan yang berlaku dan disepakati bersama, disertai pembeberan rasional atau pertanggungjawabannya. Sesuai ketentuan bahwa pada akhirnya setiap Fakultas Psikologi bertanggungjawab untuk menerapkan kurikulum meliputi Kurikulum Inti yang ditetapkan oleh Tripartit dan Kurikulum Institusional yang ditetapkan sendiri, maka model kurikulum yang hendak dipaparkan di sini lebih dimaksudkan sebagai tawaran atau setidaknya sebagai sekadar masukan untuk dipertimbangkan.

2. Kompetensi Dalam Program Pendidikan Sarjana Psikologi

Dalam *Kepmen 045* dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah "*seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai*

syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu" (Pasal 1). Penekanan pada istilah "tindakan" dan "bidang pekerjaan" dalam rumusan ini bisa ditafsirkan bahwa kompetensi yang dimaksud cenderung dimaknai sebagai ketrampilan kerja yang lebih lazim dikaitkan dengan pendidikan yang bercorak vokasional.

Nuansa rumusan di atas berbeda dengan nuansa rumusan tentang kualifikasi lulusan program sarjana sebagaimana tercantum dalam *Kepmen 232* yang merupakan salah satu ketentuan acuannya, dan berbeda pula dengan nuansa rumusan tentang tujuan pendidikan Sarjana Psikologi sebagaimana tercantum dalam *Ketber 01* yang merupakan ketentuan turunannya. Dalam kedua ketetapan yang terakhir, "kompetensi" yang sama itu dirumuskan dengan menyebutkan unsur-unsur kecakapan umum seorang manusia terdidik dalam disiplin ilmu tertentu yang lebih lazim dikaitkan dengan pendidikan yang bercorak *liberal arts* atau humaniora. Dalam kasus *Kepmen 232* hal ini sedikit mengherankan, sebab dengan mencantumkan lima kelompok matakuliah (Pengembangan Kepribadian, Keilmuan dan Ketrampilan, Keahlian Berkarya, Perilaku Berkarya, dan Berkehidupan Bermasyarakat) pada beberapa pasalnya yang pada dasarnya diadopsi dari empat pilar pendidikan UNESCO (*learning to know, learning to be, learning to do, dan learning to live together*), keputusan ini sesungguhnya hendak menekankan konsep kompetensi sebagaimana lazim dikaitkan dengan pendidikan yang bercorak vokasional.

Sejak zaman Yunani kuno, zaman para pemikir Kristen pada awal Abad Pertengahan, sampai zaman modern atau pascamodern sekarang, pengertian dasar pendidikan yang bercorak "humanitas" atau "artes liberales" atau "humaniora" kiranya tetap, yaitu pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan kodrat manusia atau kemanusiaan dalam diri peserta didik sehingga memiliki kemasakan pribadi sebagai

individu dan warga masyarakat yang bebas atau merdeka. Tujuan pendidikan tersebut pada dasarnya mencakup tiga jenis kemampuan, yaitu rasa identitas yang kuat sebagai pribadi dan warga suatu komunitas, sekaligus disertai dengan kemampuan berpikir kritis demi mencapai emansipasi dan mendapatkan makna dengan cakrawala yang semakin luas, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan mengungkapkan diri secara efektif (Sastrapratedja, 2001). Pada zaman Renaissance tujuan pendidikan itu dicapai lewat *studia humanitatis* yang mencakup *gramatika* atau penguasaan tata bahasa, *retorika* atau seni berpidato, puisi, sejarah dan filsafat. Pada zaman modern atau pascamodern sekarang kemampuan itu ditumbuhkan antara lain lewat pembelajaran ilmu sejarah, filsafat, serta bahasa dan kesusastraan (Sastrapratedja, 2001).

Di Amerika Serikat, pendidikan yang bercorak *liberal arts* atau humaniora cenderung dipertentangkan dengan dan dipandang lebih unggul dibandingkan pendidikan yang bercorak vokasional, bahkan hingga kini. Pendidikan yang bercorak humaniora dipandang bertujuan mentransformasikan hati dan jiwa setiap peserta didik sehingga menjadi manusia yang semakin halus budi-bahasa dan semakin luas cakrawala pemikirannya. Tujuan itu dicapai dengan pemberian pengalaman fundamental antara lain lewat pembelajaran filsafat, kesusastraan, politik, sejarah, teologi, bahasa Latin dan Yunani, serta matematika dan sains. Pendidikan humaniora tidak memberikan ruang bagi perkara yang dipandang remeh seperti *career training* atau persiapan karir. Di masa lalu dalam sejarah pendidikan di Amerika Serikat, konon pendidikan *liberal arts* ini hanya diperuntukkan bagi kaum muda dari kalangan elit, sedangkan kaum muda sisanya diarahkan ke *vocational training* atau pendidikan ketrampilan sebagai persiapan langsung untuk terjun dalam bidang profesi atau pekerjaan tertentu, atau bahkan hanya diberi *mediocre education* atau pendidikan yang kurang bermutu (www.thomasmorecollege.edu).

Konsep kompetensi dalam arti yang lazim dikaitkan dengan pendidikan vokasional pertama kali muncul dalam gerakan *competency based education and training* (CBET), yaitu sejenis upaya reformasi pendidikan tinggi ke arah menjadikannya lebih sesuai dengan kepentingan dunia industri dalam kerangka pendekatan behavioristik yang berlangsung di Inggris dan Amerika Serikat pada awal abad kedua puluh (Kelly, 2002). Gagasan dasarnya adalah bahwa program pendidikan perlu dirancang untuk menjadikan pembelajar siap pakai guna memenuhi tuntutan tugas atau jabatan yang akan mereka laksanakan dalam dunia pekerjaan. Para pendukung gerakan ini memandang bahwa format ini merupakan jawaban yang tepat terhadap perlunya memperbaiki pendidikan dalam dunia yang semakin kompleks. Namun para penentang mengecam format pendidikan ini sebagai terlalu reduksionistik, sempit, kaku, tidak utuh, serta tidak sehat secara teoretis, empiris maupun pedagogis. Sebagai alternatif dikemukakan pandangan tentang kompetensi yang lebih integratif sebagai kombinasi kompleks antara pengetahuan, sikap, ketrampilan dan nilai-nilai dalam konteks pelaksanaan tugas yang bisa diasah secara terus-menerus (Kerka, 2002; Kelly, 2002). Kurikulum inti pendidikan tinggi di Tanah Air sebagaimana diatur dalam *Kepmen 045* enderung menganut pandangan yang lebih luas-integratif tentang kompetensi (Supratiknya, 2002).

3. Pendidikan Tinggi Psikologi: Beberapa Pemandangan

Di Amerika Serikat benih pendidikan tinggi psikologi sudah mulai disemaikan pada awal abad kedelapan belas, namun baru sesudah tahun 1950 kurikulum pendidikan psikologi pada tingkat *undergraduate* mulai diberi perhatian secara serius. Lewat pertemuan-pertemuan seperti *Cornell Conference* (1951), *Michigan Conference* (1960), dan *St. Mary's Conference* (1991), antara lain ditegaskan bahwa psikologi diajarkan sebagai

disiplin ilmiah dalam tradisi *liberal arts* serta menolak "*applied courses with a vocational training*" sebab jenis pendidikan semacam itu dipandang tepat diberikan hanya sesudah jenjang *undergraduate*. Tujuan dasar pendidikan psikologi pada jenjang *undergraduate* adalah mengajar peserta didik agar mampu berpikir sebagai ilmuwan tentang perilaku dan pengalaman hidup disertai delapan tujuan umum, meliputi: (1) pengetahuan yang luas; (2) ketrampilan berpikir; (3) ketrampilan berbahasa; (4) ketrampilan mengumpulkan informasi dan membuat sintesis; (5) kemampuan meneliti; (6) ketrampilan interpersonal; (7) sejarah psikologi; serta (8) etika dan nilai-nilai (Brewer, 1997).

Selanjutnya, kurikulum pendidikan psikologi pada jenjang *undergraduate* terdiri atas empat komponen mata kuliah yang mencerminkan taraf penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang semakin meningkat, dan yang harus ditempuh secara berurutan. Keempat komponen matakuliah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, *introductory course* atau matakuliah pengantar. Mata kuliah ini merupakan prasyarat bagi semua mata kuliah psikologi lainnya serta memberikan telaah ringkas tentang aneka topik dan metode untuk memberi gambaran tentang berbagai konsep, prinsip dan teori dalam disiplin psikologi. Kedua, mata kuliah metodologi, meliputi teknik-teknik penelitian eksperimental, korelasional, dan studi kasus, statistik, serta metode psikometris. Ketiga, *content courses* atau mata kuliah materi, meliputi bidang-bidang pengetahuan utama yang menjadi ciri khas disiplin psikologi. Bidang-bidang ini mencakup aspek-aspek ilmu alam dan ilmu sosial dari disiplin psikologi. Keempat, *integrative experience* atau pengalaman integratif. Komponen ini bisa mencakup salah satu atau gabungan antara *internships* atau kepaniteraan, melakukan penelitian dengan supervisi dosen, atau *capstone courses* alias matakuliah puncak. Yang lazim dijadikan matakuliah puncak antara lain adalah Sejarah Psikologi, Psikologi Umum

Lanjut atau Gagasan-gagasan Besar dalam Psikologi (Brewer, 1997).

Maka, kurikulum psikologi pada jenjang *undergraduate* di Amerika Serikat berbasis isi, diwujudkan dalam daftar matakuliah yang dipandang sebagai penciri ranah kajian dan pengetahuan disiplin psikologi (Perlman & McCann, 1999). Berdasarkan survei terhadap katalog dari 400 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan psikologi pada jenjang *undergraduate*, Perlman & McCann (1999) berhasil mengidentifikasi 30 matakuliah yang paling sering muncul dalam kurikulum *undergraduate* psikologi, yaitu: (1) Pengantar Psikologi; (2) Psikologi Abnormal; (3) Psikologi Sosial; (4) Psikologi Kepribadian; (5) Psikologi Belajar; (6) Kapita Selekta Psikologi; (7) Sejarah dan Aliran-aliran Psikologi; (8) Tes dan Pengukuran; (9) Psikologi Kognitif; (10) Statistik; (11) Psikologi Anak; (12) Psikologi Fisiologis; (13) Psikologi Eksperimental; (14) Psikologi Industri dan Organisasi; (15) Belajar Mandiri; (16) Seminar; (17) Psikologi Perkembangan; (18) Metodologi Penelitian; (19) Perkembangan Manusia; (20) Psikologi Remaja; (21) Perkembangan Dewasa/Gerontologi; (22) Seksualitas Manusia; (23) Psikologi Konseling; (24) Pengalaman Lapangan; (25) Psikologi Wanita; (26) Psikologi Biologis; (27) Penyesuaian; (28) Partisipasi dalam penelitian; (29) Sensasi dan Persepsi; dan (30) Psikologi Komparatif/Perilaku Hewani.

Di Amerika Serikat kurikulum yang berbasis kompetensi dalam pendidikan psikologi dikembangkan pada jenjang *graduate* atau pasca sarjana yang dimaksudkan sebagai program pendidikan profesional. Program pasca sarjana – khususnya doktor – psikologi di Amerika Serikat juga sudah berlangsung sejak 1880-an namun kesepakatan tentang standar pendidikannya baru mulai dicapai pada tahun 1949 (Routh, 2000; Benjamin & Baker, 2000; Benjamin, 2001). Dalam sebuah pertemuan yang kemudian dikenal sebagai *Boulder Conference* (1949) berhasil

disepakati suatu model pendidikan doktor di bidang psikologi klinis yang memberi bekal mendalam di bidang *professional service* atau praktek dan *research contribution* atau penelitian yang selanjutnya dikenal sebagai *scientist-practitioner model* atau *Boulder model* (Benjamin & Baker, 2000; Baker & Benjamin, 2000). Menurut model yang masih banyak diikuti hingga kini tersebut, "*Education and training in professional psychology require training in the conduct of scientific research, clinical practice, and their integration*" (Belar, 2000: 249).

Kendati modelnya sudah berhasil dirumuskan, namun pengolahan materi pendidikannya pada awalnya masih terikat pada tradisi kurikulum berbasis subyek atau isi (Benjamin, 2001). Lewat serangkaian pertemuan lain sesudah *Boulder Conference* (1949), seperti *Northwestern University Conference* (1951), *Miami Beach Conference* (1958), *Utah Conference* (1987), akhirnya dalam suatu pertemuan yang dikenal sebagai *Mission Bay Conference* (1987) yang diselenggarakan oleh *National Council of Schools of Professional Psychology* disepakati bahwa: "*core curriculum development and evaluation must focus on a set of competencies rather than content areas*" (Weiss, 1991) dan bahwa "*there should be a core curriculum in professional psychology based on six identifiable competency areas: relationships, assessment, intervention, research and evaluation, consultation and education, and management and supervision*" (Weiss, 1991; Bent, 1991).

Di Uni Eropa, pendidikan psikologi pada jenjang setara dengan jenjang sarjana dan magister direncanakan akan dikelola sebagai terintegrasi dan cenderung berorientasi vokasional sebagai pendidikan dan pelatihan di bidang *professional psychology* (Lunt et al., 2001). Pokok-pokok penting dari kerangka kurikulum yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, bertolak dari konsep psikologi sebagai "*helping profession*" maka peran utama psikolog dirumuskan sebagai: "*to develop and apply*

psychological principles, knowledge, models and methods in an ethical and scientific way in order to promote the development, well-being and effectiveness of individuals, groups, organisations and society" (Lunt et al., 2001: 5).

Maka, kedua, kompetensi kunci (*key roles*) seorang psikolog meliputi (Lunt et al., 2001: 6): (1) *develop, implement and maintain personal and professional standards and ethical practice*; (2) *apply psychological and related methods, concepts, models, theories and knowledge derived from reproducible research findings*; (3) *research and develop new and existing psychological methods, concepts, models, theories and instruments in psychology*; (4) *communicate psychological knowledge, principles, methods, needs and policy requirements*; (5) *develop and train the application of psychological skills, knowledge, practices and procedures*; (6) *manage the provision of psychological systems, services and resources*.

Ketiga, untuk menumbuhkan kompetensi inti tersebut diperlukan *preservice education/training* berupa program akademik selama minimal lima tahun dan pengalaman menjalankan praktek di bawah supervisi psikolog senior selama minimal satu tahun. Program akademiknya sendiri terbagi ke dalam dua fase. Fase pertama, setara dengan tingkat *Bachelor*, berlangsung selama tiga tahun dan bertujuan memberikan pendidikan dasar di bidang aneka ketrampilan psikolog dan kemampuan melakukan penelitian di bidang psikologi lewat pengenalan aneka spesialisasi serta aneka teori dan teknik penting di dalam psikologi. Secara lebih rinci, daftar matakuliahnya meliputi: (1) kelompok matakuliah orientasi: Aneka Metode dalam Psikologi, Sejarah Psikologi, serta Aneka Spesialisasi dan Bidang Profesi Psikologi; (2) kelompok matakuliah teori dan praktek: Psikologi Umum, Neuropsikologi, Psikologi Kognitif, Psikologi Diferensial, Psikologi Sosial, Psikologi Perkembangan, Psikologi Kepribadian, Psikologi Kerja, Psikologi Kesehatan

dan Klinis, Psikologi Pendidikan, Psikopatologi, Teori tentang Data dan Tes, Teori Kuesioner, Teori Evaluasi, serta Pelatihan Ketrampilan Diagnostik, Pelatihan Ketrampilan Wawancara, Pelatihan Konstruksi Tes dan Kuesioner, Pelatihan Intervensi Kelompok; (3) kelompok matakuliah *ketrampilan akademik*: Pengumpulan Informasi/Kepustakaan, Membaca/Menulis Makalah, dan Etika; (4) kelompok matakuliah *metodologi*: Pengantar ke Aneka Metode: Metode Eksperimental, Aneka Metode Kualitatif dan Kuantitatif, serta Praktek Eksperimental, Praktek Metodologi dan Statistik, Pelatihan Pengumpulan Data, dan Analisis Kualitatif; (5) kelompok matakuliah Teori Nonpsikologi: Epistemologi, Filsafat, Sosiologi, dan Anthropologi. Perlu diketahui, fase ini belum diarahkan pada memberikan kualifikasi untuk menduduki jabatan tertentu dan juga belum memberikan kompetensi untuk melakukan praktek secara mandiri di bidang pemberian layanan psikologi.

Fase kedua, setara dengan tingkat *Master*, berlangsung selama dua tahun dan bertujuan mempersiapkan mahasiswa untuk terjun dalam praktek profesional secara mandiri sebagai psikolog. Tersedia dua pilihan, yaitu jalur umum yang mempersiapkan lulusan untuk melanjutkan studi ke tingkat PhD atau bekerja sebagai psikolog umum serta jalur spesialisasi yang mempersiapkan lulusan untuk bekerja sebagai psikolog di bidang psikologi tertentu. Pendidikan akademik pada kedua fase di atas diorganisasikan berdasarkan tiga perspektif dasar, yaitu (1) individual; (2) kelompok; dan (3) sistem/masyarakat.

Fase ketiga, yaitu menjalani praktek di bawah supervisi seorang psikolog senior, berlangsung selama minimal satu tahun. Tujuannya adalah mempersiapkan lulusan agar mampu menyelenggarakan praktek mandiri sebagai psikolog, mengembangkan etos kerja sebagai psikolog profesional, serta mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan pengetahuan teoretis dan pengetahuan praktis.

Sebagaimana dinyatakan oleh sejumlah pemerhati (Messer, 1997; Perlman & McCann, 1999), pendidikan psikologi khususnya pada tingkat setara dengan program sarjana di Tanah Air – *undergraduate* di Amerika Serikat dan *Bachelor* di Uni Eropa – kiranya memang senantiasa bergerak dinamis di antara sejumlah tegangan yang perlu dicarikan titik keseimbangannya. Pertama, tegangan antara penekanan pada pendidikan akademik yang mempersiapkan lulusan untuk melanjutkan studi ke tingkat pascasarjana dan penekanan pada pendidikan vokasional demi mempersiapkan lulusan memiliki cukup kompetensi untuk langsung memasuki lapangan kerja (*postbaccalaureate employment*). Kedua, tegangan antara penekanan pada pendidikan generalis dengan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan yang luas-umum atau pada pendidikan spesialis yang menuntut mahasiswa memilih konsentrasi pada tema-tema dan/atau bidang-bidang psikologi tertentu. Ketiga, tegangan antara penekanan pada aspek materi ilmu sosial dan aspek materi ilmu alam (*natural science*).

Dari ketiga tegangan tersebut, yang sudah berhasil disepakati titik keseimbangannya adalah menyangkut aspek materinya, khususnya berupa materi ilmu sosial menempati bagian terbesar sedangkan materi ilmu alam menempati bagian yang relatif kecil. Menyangkut dua tegangan lainnya hingga kini cenderung masih terus menjadi bahan perdebatan. Di pihak lain harus diakui, menyangkut tegangan yang pertama tuntutan dari pihak masyarakat dan calon mahasiswa ke arah penekanan pada pendidikan vokasional kiranya juga semakin kuat (Brewer, 1997). Maka menyangkut pendidikan psikologi pada tingkat sarjana-pascasarjana ini bisa diduga bahwa di masa mendatang pola Uni Eropa yang lebih bercorak integratif-vokasional kiranya akan cenderung menggeser pola Amerika Serikat yang cenderung bercorak segregatif, khususnya berupa pendidikan bercorak *liberal arts* pada

jenjang *undergraduate* dan pendidikan bercorak vokasional-profesional pada jenjang *graduate*.

4. Kurikulum Program Sarjana Di Tanah Air: Sebuah Model

Pola pendidikan psikologi khususnya pada tingkat Sarjana dan Magister di Tanah Air sebagaimana diatur dalam *Ketber 01*, *Ketber 02* dan *Ketber 03* serta lebih-lebih sebagaimana dilandasi oleh *Kepmen 232* dan *Kepmen 045*, cenderung bersemangat integratif-vokasional serta mirip dengan pola pendidikan psikolog di Uni Eropa. Untuk mencapai kualifikasi sebagai Psikolog Profesional yang memiliki kompetensi untuk melakukan praktek pemberian layanan psikologis secara mandiri, seseorang minimal harus menempuh program pendidikan Sarjana Psikologi dan program pendidikan Magister Profesional Psikologi (Psikolog).

Khusus tentang kurikulum program pendidikan Sarjana Psikologi, berbagai ketentuan di atas menetapkan bahwa kurikulum tersebut harus mencakup beban studi sebesar 144-160 *sks*, terdiri atas Kurikulum Inti sebesar 67-68 *sks* yang ditetapkan oleh Tripartit dan Kurikulum Institusional sebesar 76-92 *sks* yang harus ditetapkan sendiri oleh Fakultas Psikologi yang bersangkutan. Dalam rangka menanggapi amanat berbagai ketetapan di atas, penulis pernah mengusulkan kemungkinan menggunakan enam kompetensi inti psikolog versi pendidikan profesional psikologi di Amerika Serikat sebagai dasar untuk mengembangkan suatu kurikulum program pendidikan Sarjana Psikologi berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan program pendidikan profesionalnya pada tingkat Magister (Supratiknya, 2002). Berikut ini akan disajikan sejenis tawaran model kurikulum yang dimaksud sebagai suatu versi interpretasi atas berbagai ketetapan resmi yang berlaku – khususnya *Kepmen 232* dan *Kepmen 045* - serta dengan memperhatikan konteks kehidupan masyarakat yang pluralistik di Tanah Air. Sekadar untuk memberikan ilustrasi tentang cara

mengkontekstualisasikannya dengan tuntutan institusi pendidikan tinggi lokal tertentu, model kurikulum ini dikontekstualisasikan dengan kebijakan institusional Universitas Sanata Dharma. Semoga pembatasan ini tidak mengurangi kesempatan untuk memperdebatkannya demi kebaikan bersama.

Terlebih dulu perlu dikemukakan rasional yang dipakai sebagai landasan dalam pengembangan model kurikulum ini. Pertama, dalam *Kepmen 232* yang dimaksud dengan kurikulum mencakup tiga hal sekaligus, yaitu seperangkat isi atau bahan kajian dan pelajaran beserta cara penyampaian dan penilaiannya (Ps.1, butir 6). Dalam tulisan ini pengertian kurikulum dibatasi hanya pada seperangkat isi atau bahan kajian dan pelajaran.

Kedua, mengingat program pendidikan Sarjana Psikologi bukan bersifat terminal dalam arti bahwa untuk mencapai kualifikasi psikolog profesional mandiri masih perlu ditempuh program pendidikan profesional pada tingkat Magister, maka kiranya lebih strategis mengambil beban studi seminimal mungkin dalam batas yang diijinkan untuk program pendidikan Sarjana Psikologi.

Ketiga, menyangkut jenis kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *Kepmen 045*, mengikuti azas *less is more* kiranya juga lebih tepat membatasi hanya pada kompetensi utama dan kompetensi pendukung dengan rasio 80% kompetensi utama berbanding 20% kompetensi pendukung. Sesuai Pasal 3 Ayat 1 *Kepmen 045*, kompetensi utama akan dicirikan dalam Kurikulum Inti yang sudah ditetapkan oleh Tripartit dalam *Ketber 01*. Kompetensi utama ini dapat dipandang sebagai apa yang oleh Messer et al. (1999) disebut "*general major*" atau bidang mayor yang bersifat generalis, dalam arti – mengikuti ketentuan dalam Pasal 3 Ayat 2 *Kepmen 045* – dasar, acuan baku minimal, berlaku secara nasional dan internasional, serta lentur dan akomodatif.

Kompetensi pendukungnya akan dicirikan dalam Kurikulum Institusional yang akan ditetapkan sendiri serta yang dapat dipandang sebagai apa yang oleh Messer et al. (1999) disebut "*subarea concentration*" alias konsentrasi di dalam mayor yang bersifat generalis di atas. Mengingat sifat pluralistik budaya masyarakat Indonesia di satu pihak sedangkan di pihak lain pergaulan antar berbagai bangsa dan budaya akan semakin intens sebagai akibat langsung dari globalisasi, kiranya cukup strategis dan bisa dipertanggungjawabkan untuk mengisi komponen konsentrasi ini dengan bidang Psikologi Lintas Budaya. Pilihan ini sekaligus akan memberikan dua manfaat praktis lain. Pertama, bidang ini membuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk lebih mengenal pendekatan kualitatif sebagai sarana untuk memahami perilaku manusia dan masyarakat secara lebih utuh-kontekstual. Kedua, bidang ini juga akan lebih mendorong serta membuka kesempatan lebih besar bagi berkembangnya sebuah psikologi yang lebih relevan dengan kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Ketiga, bidang ini juga akan menyumbang corak *liberal arts* atau humaniora dari kurikulum yang bersemangat vokasional ini. Pengembangan kurikulum konsentrasi di bidang Psikologi Lintas Budaya dalam model kurikulum ini sebagian besar didasarkan pada materi buku *Cross-Cultural Psychology: Research and application* (Berry, Poortinga, Segall, & Dasen, 1992).

Keempat, sesuai ketentuan pada Pasal 2 Ayat (2) *Kepmen 045* dan Pasal 7 Ayat (3) *Kepmen 232* serta memperhatikan ketentuan pada Pasal 10 *Kepmen 232*, baik Kurikulum Inti sebagai penciri kompetensi utama sekaligus sebagai mayor, maupun Kurikulum Institusional sebagai penciri kompetensi pendukung sekaligus sebagai konsentrasi, kiranya perlu diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok elemen landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan ketrampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam

berkarya, serta pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat.

Kelima, dari segi substansi kompetensinya Kurikulum Inti sebagai penciri kompetensi utama sekaligus mayor dan Kurikulum Institusional sebagai penciri kompetensi pendukung sekaligus konsentrasi akan diorganisasikan berdasarkan jenis-jenis kompetensi inti yang diadopsi dari program pendidikan profesional psikologi di Amerika Serikat, yaitu *relationship, assessment, research and evaluation, intervention, consultation and teaching*, serta *management and supervision*. Kompetensi lain yang mendasari baik Kurikulum Inti maupun Kurikulum Institusional namun yang berada di luar keenam kompetensi inti tersebut akan dikategorikan sebagai kompetensi umum. Adopsi semacam ini kiranya bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan paling sedikit dua alasan. Pertama, enam kompetensi inti di atas pada dasarnya mirip dengan enam kompetensi atau peran kunci dalam pendidikan profesional psikologi di Uni Eropa. Artinya, kurang lebih memiliki sifat universal atau lebih tepat, esensial. Kedua, adopsi semacam itu dapat dipandang sejalan dengan jiwa ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (2).c. *Kepmen 045* yang menyatakan bahwa "Kurikulum inti suatu program studi bersifat: berlaku secara nasional dan internasional." Tentu saja, adopsi semacam itu tetap perlu dilakukan secara kritis dan hati-hati, khususnya tanpa harus menjadi terjebak ke dalam perangkap neoliberalisme global (Wibowo & Wahono, 2003).

Keenam, jiwa dan suasana keseluruhan kurikulum tersebut harus selaras dengan visi-misi serta kebijakan yang lebih operasional menyangkut kurikulum yang berlaku di institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan. Dalam konteks Universitas Sanata Dharma, tuntutan institusional lokal itu minimal tercermin dalam dua mata kuliah pengembangan kepribadian yang khas Universitas Sanata Dharma, yaitu Moral dan Filsafat Ilmu Pengetahuan (Wahana, 2003), di samping tiga mata kuliah lain yang sudah

tercantum dalam kurikulum inti (Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan) serta satu matakuliah yang bisa dipandang berfungsi membentuk kemampuan berkehidupan bermasyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata. Maka mengikuti keenam prinsip di atas model kurikulum yang dimaksud kiranya akan berbentuk seperti disajikan dalam Tabel 1, dengan jumlah beban studi 150 sks.

5. Penutup

Pengandaian lain yang dipakai dalam menyusun model kurikulum program Sarjana Psikologi di atas adalah bahwa kurikulum pendidikan psikologi pada semua jenjang, yaitu jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor, adalah bersifat terintegrasi dan *stream-lined*. Maksudnya kurikulum pada ketiga jenjang tersebut bertolak dari konsep yang sama tentang peran psikolog sebagai *professional helper* serta mencakup serangkaian kompetensi utama yang sama pula, yaitu kemampuan mengembangkan atau melaksanakan relasi, asesmen, intervensi, penelitian dan evaluasi, konsultasi dan pendidikan, serta manajemen dan supervisi. Mengingat penjenjangan pada dirinya mengandaikan perbedaan dalam keluasan dan/atau kedalaman penguasaan masing-masing kompetensi, maka diperlukan sejenis kriteria untuk membedakan ketiga jenjang tersebut.

Secara umum bisa dikatakan bahwa semakin tinggi jenjang, maka penguasaan aneka kompetensi tersebut haruslah semakin luas dan/atau mendalam. Keluasan yang dimaksud dapat tercermin dari cakupan penguasaan materi dan metode yang semakin luas, sedangkan kedalamannya bisa tercermin dari penguasaan atas materi dan metode yang sama pada taraf yang semakin canggih. Secara khusus dan antara lain mengikuti penjenjangan pendidikan akademik seperti diatur dalam Pasal 3 *Kepmen 232*, pembatasan jenjang yang dimaksud dapat dicoba ditetapkan mengikuti minimal tiga dimensi, yaitu: (1) dimensi menjelaskan-memutakhirkan-

mengembangkan teori; (2) dimensi individual-kelompok-sistem/masyarakat; dan (3) dimensi normal-neurotik-psikotik

Sebagai sekadar ilustrasi, menurut keempat kriteria di atas maka lulusan program Sarjana Psikologi diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai agar mampu mengaplikasikan suatu teori psikologi untuk menjelaskan gejala tertentu dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menjelaskan dan menangani gangguan-gangguan psikologis pada tataran individu dan normal. Menurut kriteria yang sama, lulusan program Magister Psikologi diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang lebih memadai agar mampu memutakhirkan dalam arti mengkritik dan memodifikasi sebuah teori psikologi dalam rangka menjelaskan gejala tertentu dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menjelaskan dan menangani gangguan-gangguan psikologis sampai ke tataran kelompok kecil dan neurotik. Menurut kriteria yang sama pula, lulusan program Doktor Psikologi diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang lebih memadai lagi agar mampu mengembangkan teori psikologi baru untuk menjelaskan gejala tertentu dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menjelaskan dan menangani gangguan-gangguan psikologis sampai ke tataran sistem/masyarakat dan psikotik. Tentu saja, kriteria di atas masih perlu dijabarkan secara lebih rinci, antara lain dengan juga mempertimbangkan jenis program pendidikannya khususnya pada jenjang pascasarjana, yaitu apakah berupa program pendidikan akademik atau profesional.

Daftar Pustaka

- Baker, D.A. & Benjamin, L.T., Jr. (2000). The affirmation of the scientist-practitioner: A look back at Boulder. *American Psychologist*, 55, 241-247.
- Belar, C.D. (2000). Scientist-practitioner ≠ Science + practice. Boulder is Boulder. *American Psychologist*, 55, 249-250.
- Benjamin, L.T., Jr. & Baker, D.B. (2000). Boulder at 50. Introduction to the section. *American Psychologist*, 55, 233-236.
- Benjamin, L.T., Jr. (2001). American psychology's struggles with its curriculum. Should a thousand flowers bloom? *American Psychologist*, 56, 735-742.
- Bent, R.J. (1991). The professional core competency areas. Dalam R.L. Peterson et al. (Eds.). *The core curriculum in professional psychology* (77-81). Washington, D.C.: APA.
- Berry, J.W.; Poortinga, Y.H.; Segall, M.H.; & Dasen, P.R. (1992). *Cross-cultural psychology: Research and application*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brewer, C.L. (1997). Undergraduate education in psychology: Will the mermaids sing? *American Psychologist*, 52, 434-441.
- Hasil lokakarya pendidikan profesi psikologi Indonesia (2000). Jakarta: Himpsti.
- Kelly, C. (2002). Models of education. *Microsoft Internet Explorer*.
- Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Jakarta: Depdiknas.
- Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Jakarta: Depdiknas.
- Kerka, S. (2002). Competency-based education and training. *Microsoft Internet Explorer*.
- Lunt, I.; Bartram, D.; Dopping, J.; Georgas, J.; Jern, S.; Job, R.; Lecuyer, R.; Newstead, S.; Nieminen, P.; Odland, T.; Peiro, J.M.; Poortinga, Y.H.; Roe, R.; Wilpert, B.; Hermann, E.; in collaboration with EFPPA (2001). EuroPsyT. A framework for education and training for psychologists in Europe. www.europsych.org
- Messer, W.S. (1997). Undergraduate psychology curricula in North Carolina. *Teaching of Psychology*, 24, 127-130.
- Messer, W.S.; Griggs, R.A. & Jackson, S.L. (1999). A national survey of undergraduate psychology degree options and major requirements. *Teaching of Psychology*, 26, 164-170.
- Perlman, B. & McCann, L.I. (1999). The most frequently listed courses in the undergraduate psychology curriculum. *Teaching of Psychology*, 26, 177-182.
- Routh, D.K. (2000). Clinical psychology training. A history of ideas and practices prior to

1946. *American Psychologist*, 55, 236-241.
- Sastrapratedja, M., S.J. (2001). *Pendidikan sebagai humanisasi*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma.
- Supratiknya, A. (2002). Kompetensi inti psikolog. *Suksma*, 1, 7-18.
- Supratiknya, A. (2002). Service-learning, belajar dari konteks kehidupan masyarakat: Paradigma pembelajaran berbasis problem, mempertemukan Jean Piaget dan Lev Vygotsky. *Pidato Dies Natalis ke-47*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Surat Ketetapan Bersama antar Dekan Fakultas Psikologi se Indonesia dan Himpsi No. 01/KOL.PSI/02 tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Psikologi.
- Surat Ketetapan Bersama antar Dekan Fakultas Psikologi se Indonesia dan Himpsi No. 02/KOL.PSI/02 tentang Program Pendidikan Magister Profesional Psikologi.
- Surat Ketetapan Bersama antar Dekan Fakultas Psikologi se Indonesia dan Himpsi No. 03/KOL.PSI/02 tentang Program Pendidikan Magister Sains Psikologi.
- Wahana, P. (2003). Matakuliah pengembangan kepribadian Universitas Sanata Dharma. *Warta Kampus*, No. 07, Th. I, 19-21.
- Weiss, B.J. (1991). Toward a competency-based core curriculum in professional psychology: A critical history. Dalam R.L. Peterson, J.D. Holland, R.J. Bent, E. Davis-Russell, G.E. Edwall, K. Polite, D.L. Singer, & G. Stricker (Eds.). *The core curriculum in professional psychology* (13-21). Washington, D.C.: APA.
- Wibowo, I. & Wahono, F. (eds.). *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas.

www.thomasmorecollege.edu

Tabel 1: Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Psikologi 2002

Kompe- tensi	Ele- men	Kompetensi							Jum- lah
		Umum	Relasi	Asesmen	Intervensi	Penelitian & Evaluasi	Konsultasi & Pendidikan	Manajemen & Supervisi	
Utama	MPK	Pd.Agm. 2 Pd.Pcsl. 2 Pd.Kwrg. 2 Moral 2							8
	MKK	Psi.Faal 2 Psi.Um.I 3 Psi.Um.II 3 Kepr.I 3 Kepr.II 3 Ps.Perk.I 3 Ps.Perk.II 3 Psi.Sos.I 3 Psi.Sos.II 3 PIO 2 Psi.Abn. 2 Psi.Klin. 2 Psi.Pend. 2 Psi.Kogn. 2 Psi.Bio. 2 Psi.Konsl. 2 Seminar 2 Skripsi 6	Psik.III: Interview 3 Psi.Kom. 2 Din.Kel. 2 Kom.Mas. 2	Psik.I: Tes Psi. 3 Ts.Km.Int. 3 Ts.Kepr. 3 As.Anak 3		Met.Pen.I 3 Statistik 3 Psi.Eksp. 2 Psik.II: Observasi 3 Me.Ev.Pr. 2			82
	MKB	Psikometri 2 Kon.Tes 2 Pe.Kue.& Skl.Psi. 2			Konseling 2 Psiktrp.I 2 Psiktrp.II 2		Pngb.Prog. 2 Kes.Men. 2 di Org. 2 Pd.Ortu & Pasutri 2	Tnk.Sup. 2 Mn.Ly.Ps. 2	22
	MPB	Filsafat 2 Kode Etik 2							4
	MBB	Sosiologi 2 Antrop.: Teori Keb. 2							4

Tabel 1: Kurikulum (lanjutan)

Kompe- tensi	Ele- men	Kompetensi							Jum- lah
		Umum	Relasi	Asesmen	Intervensi	Penelitian & Evaluasi	Konsultasi & Pendidikan	Manajemen & Supervisi	
Pendu- kung	MPK	Keprib. & Kebud. 2							2
	MKK	Peng.PLB 2 Psi.&Bud. Lokal 2 Trans.Bud. & Perkmb. 2	Akult.& Kon.Bud. 2	Fngs.Psik. & Kebud. 2		Met.Pen.II.3 Hermeneut. & Semiot. 2			15
	MKB				Prlk.Sehat & Kebud. 2		Kom.& Komp.Ant. 2 Bud.	Kerja, Org. & Kebud. 2	6
	MPB	Fil.Ilm.Png. 2							2
	MBB	Kel.Etnik & Minoritas 2 KKN 3							5
Jumlah		85	11	14	8	18	8	6	150

Keterangan:

- 1. Kompetensi Utama = 120 sks (80%); Kompetensi Pendukung = 30 sks (20%).
- 2. Kurikulum Inti = 67 sks (45%); Kurikulum Institusional = 83 sks (55%).